

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia penelitian dan akademik untuk merujuk pada tinjauan atau penelaahan terhadap berbagai pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang ingin diteliti.

Kegiatan kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkini dan terpercaya tentang topik yang diteliti. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memahami status terkini pengetahuan tentang topik tersebut, melihat perkembangan yang terjadi, dan mengidentifikasi kesenjangan atau celah pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian terbaru.

2.1.1 Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1 Kajian Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Muhammad Arif, Reno Affrian, Herry Febriadi (2023)	Efektivitas Program Bina Keluarga Balita Di Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (2023)	Annas, 2017	Kualitatif	Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
2.	Marita Rizkiyana & Ilyas (2021)	Implementasi Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI)	Charles O. Jones (dalam Sri Maryuni,2016:7)	Kualitatif	Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
3.	Dedi Rohman (2021)	Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) Pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang (2021)	Kaho, J Riwu, 2017:127	Kualitatif	Deskriptif	Kualitatif Deskriptif

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

Pada penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Bina Keluarga Balita di Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara”** yang dilakukan oleh Muhammad Arif, Reno Affrian, dan Herry Febriadi (2023), dijelaskan bahwa pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa Pondok Babaris belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas Program BKB dengan meninjau aspek pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, pelaksanaan program, serta hasil yang dirasakan oleh masyarakat sasaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program BKB masih terkendala oleh rendahnya partisipasi keluarga balita, keterbatasan kapasitas kader, serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan secara berkelanjutan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian Program Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai kebijakan pembangunan keluarga yang bertujuan meningkatkan kualitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia dini. Kedua penelitian sama-sama menelaah pelaksanaan program BKB di tingkat daerah serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kondisi implementasi program di lapangan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis dan konteks penelitian. Penelitian terdahulu menitikberatkan kajian pada tingkat efektivitas Program BKB di wilayah desa, dengan menilai sejauh mana tujuan program tercapai dan

manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi Program BKB di DPPKB Kota Bandung, dengan penekanan pada mekanisme pelaksanaan kebijakan, peran organisasi pelaksana, serta konteks wilayah perkotaan. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih menekankan pada penilaian hasil dan dampak program, sedangkan penelitian ini menekankan pada proses implementasi kebijakan Program BKB sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program di tingkat pemerintah daerah

Penelitian berjudul **“Implementasi Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI)”** bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program BKB yang diintegrasikan dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak dalam kerangka holistik integratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BKB-HI telah berjalan, namun belum optimal karena masih ditemukannya kendala pada aspek koordinasi lintas sektor, kapasitas kader, serta partisipasi keluarga sasaran.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian implementasi Program Bina Keluarga Balita dan penggunaan pendekatan kualitatif dalam menganalisis pelaksanaan program di tingkat daerah. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada integrasi layanan BKB dalam kerangka holistik

integratif, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada implementasi Program BKB di DPPKB Kota Bandung dari perspektif organisasi pelaksana dan mekanisme pelaksanaan kebijakan di lingkungan perkotaan.

Pada penelitian berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang”** bertujuan untuk menganalisis tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program BKB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program BKB belum optimal, yang terlihat dari rendahnya kehadiran keluarga balita dalam kegiatan BKB serta keterlibatan masyarakat yang masih terbatas pada tahap pelaksanaan, belum menyentuh tahap perencanaan dan evaluasi program.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian implementasi Program Bina Keluarga Balita, khususnya pada peran dan keterlibatan masyarakat sebagai sasaran program. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat di tingkat UPTD wilayah kecamatan, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi Program BKB di DPPKB Kota Bandung dengan penekanan pada peran organisasi pelaksana dan mekanisme pelaksanaan program dalam konteks wilayah perkotaan.

2.1.2 Konsep dan Teori

2.1.2.1 Definisi Administrasi

Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “*administration*”, dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “*administratie*”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya. Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis atau mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan *clerical work* (Silalahi, 2013: 5).

Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama (Silalahi, 2013: 8).

Administrasi dalam arti luas, *Administration* (bahasa Inggris) yang diungkapkan para ahli diantaranya :

1. Leonard D. White mengungkapkan bahwa

“administration is a process common to all group effort, public or private civil or military large scale or small scale ...”(administrasi merupakan suatu proses yang pada umumnya terdapat pada seluruh lapisan kelompok negara, swasta, sipil atau militer baik cakupan luas atau kecil....) (Handyaningrat, 1980)

2. William A. Newan mengemukakan bahwa

“administration has been defined as the guidance, leadership, and control of the effort of a group of individuals towards some common goal” (administrasi didefinisikan sebagai panduan, kepemimpinan dan pengawasan dari upaya kelompok individu-individu menuju suatu tujuan.

Pengertian luas di Indonesia juga diberikan oleh Sondang Paian Siagian (2004), yakni mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut The Liang Gie (1980:9) administrasi adalah Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu .

Administrasi mengandung tiga muatan, yakni:

1. Pertama administrasi sebagai seni adalah sebuah proses yang hanya diketahui permulaannya saja, sedang akhirnya tidak ada.
2. Kedua, administrasi mengandung unsur-unsur tertentu, yakni adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan untuk pelaksanaan tugas (termasuk di dalamnya waktu, tempat, materi, dan unsur lainnya).
3. Ketiga, administrasi sebagai proses kerja sama yang telah ada sejak manusia ada.

Menurut Siagian (2015:2) mengemukakan bahwa administrasi adalah

“keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang disadari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang sama hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Kedalam golongan peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu, tempat, peralatan, materi serta sarana lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kerjasama yang rasional dikerjakan oleh dua orang atau lebih dalam mengumpulkan data, pencatatan data and informasi untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.2.2 Definisi Administrasi Publik

Kata administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*public administration*” yang sering disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan, Indradi (2006:110). Menurut Chandler (1998) dalam Indradi (2006:114) dijelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan.

Waldo (1971) mengajukan dua buah definisi Administrasi Publik yaitu:

1. *Public administration* adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah.
2. *Public Administration* adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Oleh beliau dijelaskan lebih lanjut, organisasi menunjukkan struktur dari administrasi, sedangkan manajemen menunjukkan fungsinya. Keduanya saling bergantung dan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Administrasi melihat organisasi dalam keadaannya yang statis sedang manajemen dilihatnya dalam kondisi dinamis, kondisi bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Syafri (2012: 21) dalam buku Wirman Syafri Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh pemerintah sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) adalah

“proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikooordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (memanage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan”.

Sedangkan menurut Pasolong (2011:8) administrasi negara adalah

“kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”.

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama untuk memformulasikan dan menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan, baik untuk kepentingan pemerintah ataupun kepentingan publik.

2.1.2.3 Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “*kebijakan*” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu Lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu Charles O. Jones, (1984:25). Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (1971:18), ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu inisiatif pemerintah dengan lingkungannya”. Batasan lain tentang kebijakan public diberikan oleh

Thomas R. Dye (1975:1) yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. (Winarno, 2014:19-20).

Seorang pakar ilmu politik lain, Rose (1969:79) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Kebijakan publik adalah “serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjabarkan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut”. Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Winarno, 2014:20-22).

Jika kebijakan publik memuat nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik akan melawan implementasi. Di sisi lain, kebijakan publik harus mampu merangkul nilai-nilai dan praktik hidup yang berkembang di masyarakat. Namun, penting untuk diingat

bahwa mendefinisikan kebijakan tidak cukup hanya menekankan apa yang direkomendasi. Oleh karena itu, definisi kebijakan publik akan lebih tepat jika mencakup tidak hanya tindakan yang diusulkan, tetapi juga arah tindakan atau apa yang sedang dilakukan.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai arah tindakan dan rangkaian aktivitas yang dipilih secara sadar oleh pemerintah atau aktor publik untuk menangani masalah tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya terbatas pada keputusan formal, tetapi mencakup pilihan untuk bertindak maupun tidak bertindak, memiliki tujuan yang jelas, serta memuat instruksi dan konsekuensi yang dapat diperkirakan. Dalam prosesnya, kebijakan selalu dipengaruhi oleh nilai, peluang, dan hambatan yang berkembang di lingkungan sosial, sehingga berjalannya implementasinya sangat ditentukan oleh kesesuaian antara substansi kebijakan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dipahami sebagai proses yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah publik secara berkelanjutan.

2.1.2.4 Implementasi Kebijakan

Pada analisis implementasi Program Bina Keluarga Balita (BKB), penelitian ini tidak hanya menggunakan teori utama dari David C. Korten, tetapi juga diperkuat dengan teori Implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Penggunaan teori ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (organisasi pelaksana), dan struktur birokrasi (Pramono, 2020). Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi determinan penting dalam menentukan berjalannya pelaksanaan suatu kebijakan publik.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Dalam program BKB, komunikasi berperan penting dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki balita. Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi yang tidak merata dapat menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat program, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi.
- b. Sumber Daya, merupakan faktor penting yang mendukung pelaksanaan kebijakan, meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Ketersediaan sumberdaya yang memadai akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam implementasi Program BKB, sumberdaya manusia seperti kader dan petugas lapangan memiliki peran strategis dalam menjalankan kegiatan program. Selain itu, dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai juga diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan program secara optimal.

- c. Disposisi, yaitu sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam program BKB, sikap dan komitmen kader serta petugas pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Apabila pelaksana memiliki motivasi yang rendah atau kurang memahami pentingnya program, maka pelaksanaan kegiatan cenderung tidak optimal dan tujuan program sulit tercapai.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan aspek ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik akan memudahkan implementasi kebijakan di lapangan. Dalam pelaksanaan program BKB, struktur birokrasi melibatkan beberapa pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga kader di tingkat masyarakat, memerlukan koordinasi yang efektif. Ketidakjelasan pembagian tugas atau lemahnya koordinasi antar pelaksana dapat menghambat jalannya program.

Dimensi komunikasi dalam teori Edwards III digunakan untuk mendukung analisis dimensi program, khususnya dalam melihat bagaimana informasi program disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Dimensi sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi digunakan untuk memperkuat analisis dimensi organisasi pelaksana, karena berkaitan dengan kapasitas dan kesiapan pelaksana dalam menjalankan program. Sementara itu, komunikasi juga berperan dalam dimensi kelompok sasaran, terutama dalam mempengaruhi tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program.

2.1.2.5 Implementasi Program

Program merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya. Evaluasi terhadap suatu program sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang terkait, baik kualitas masukan, kualitas proses, maupun kualitas hasil pelaksanaan. Hal ini mengacu pada asumsi bahwa pembelajaran merupakan sistem yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu masukan, proses dan keluaran/hasil.

Menurut Abdullah (1987:398) terdapat tiga unsur penting dalam proses pelaksanaan program, diantaranya adalah:

- a. Adanya Program (kebijakan) yang dilakukan
- b. Target grub, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sedangkan menurut Jones (1991:36) terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu:

- a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

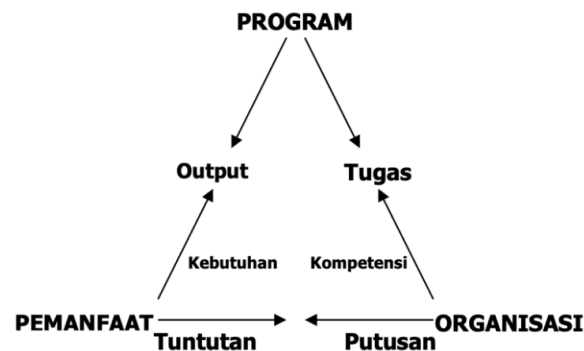
b. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c. Penerapan atau aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program menurut David C. Korten adalah model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian implementasi program menurut Korten dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Model Kesesuaian Implementasi Program Korten

Sumber: Akib & Tarigan (2000:12)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan atau implementasi program terdiri dari tiga elemen yaitu program itu sendiri, kelompok sasaran atau pemanfaat program, dan pelaksana program dalam struktur organisasi. Pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika memenuhi tiga elemen implementasi [rogram diatas. Yang pertama, yaitu kesesuaian antara program

dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib & Tarigan, 2000:12).

Dari beberapa uraian mengenai implementasi program dapat dikatakan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok orang terhadap kelompok sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya berdasarkan apa yang telah disepakati bersama.

2.1.2.6 Program Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga tentang bagaimana mendidik dan mengasuh anak balitanya serta bagaimana membantu memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya. BKB sebagai wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak balita menjadi sangat penting untuk memberdayakan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam meningkatkan kemampuan pembinaan tumbuh kembang anak, bahkan pembinaannya harus dilakukan sejak anak dalam kandungan dengan tujuan agar dapat dijaga kelangsungan hidup bayi dan anak balita (KHIBA), karena kematian ibu melahirkan tidak hanya merupakan tragedi bagi ibu sendiri, tetapi juga berpengaruh buruk terhadap anggota keluarga terutama

anak-anaknya. Oleh karena itu angka kematian ibu melahirkan tidak saja menggambarkan tingkat kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak balita namun juga menggambarkan kualitas ketahanan keluarga (BKKBN, 2013).

Program Bina Keluarga Balita merupakan sebuah program dari pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang anak balita secara optimal. Program BKB merupakan bagian integral dari upaya nasional dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

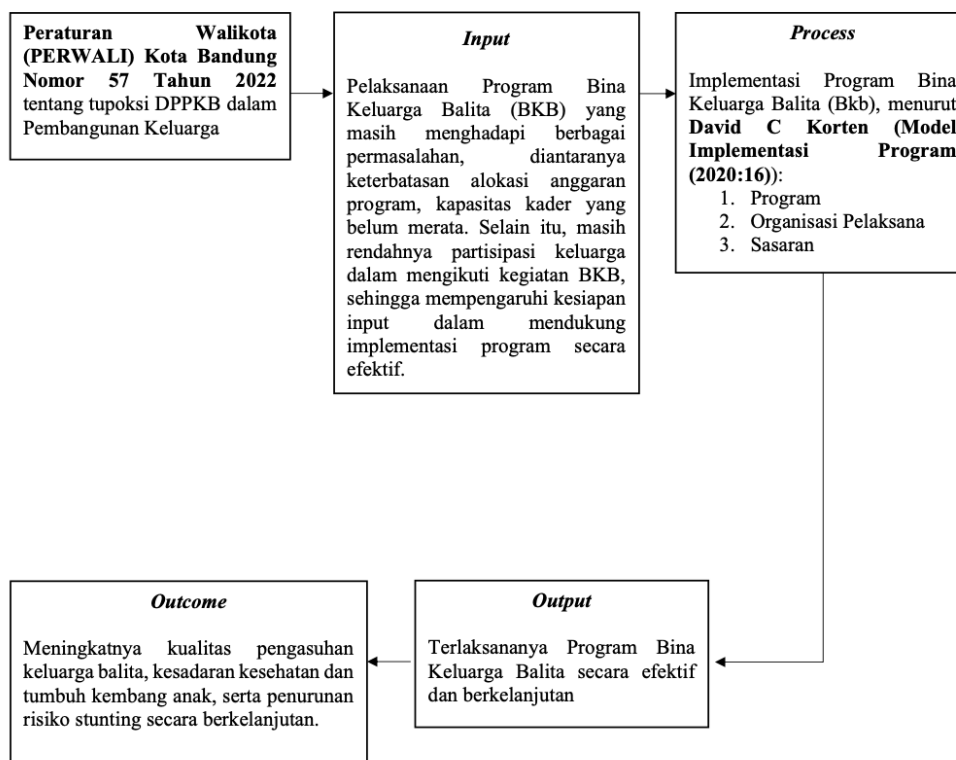
Jadi Bina Keluarga Balita adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pengelolaan, dan keterampilan keluarga khususnya orang tua dalam mendidik, mengasuh, serta membina tumbuh kembang anak balita secara optimal, baik sejak masa kehamilan hingga usia balita. Program ini menjadi wadah pemberdayaan keluarga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sekaligus menjaga kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak balita sebagai indikator kualitas ketahanan keluarga. Melalui pelaksanaan kegiatan BKB, keluarga didorong untuk mengembangkan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan kasih sayang dalam keluarga sebagai bagian integral dari upaya nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan teori yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan topik penelitian yang disusun untuk permasalahan yang terjadi. Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang peneliti temui maka peneliti akan

mengemukakan teori yang digunakan oleh peneliti dan selanjutnya akan menjadi kerangka pemikiran.

Kerangka pemikiran ini berdasarkan pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berhubungan dengan lokus dan fokus penelitian sebagai dasar pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Di dalam kerangka berpikir ini, peneliti akan menjelaskan objek penelitian dan objek permasalahan yaitu mengenai Implementasi Program Bina Keluarga Balita (BKB) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Peneliti (2026).

2.3 Proposisi

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memfokuskan pada Analisis Implementasi Program Bina Keluarga Balita (BKB) di DPPKB Kota Bandung sebagai Berikut :

1. Implementasi Program Bina Keluarga Balita oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung belum berjalan secara optimal, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh dimensi Program, Organisasi Pelaksana dan Sasaran.
2. Hambatan dalam implementasi Program Bina Keluarga Balita (BKB) di DPPKB Kota Bandung muncul akibat adanya Efisiensi anggaran serta kapasitas kader yang belum merata.